

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrohmaanirrohiim
Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Cimahi Tahun 2024 dapat selesai tepat waktu.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Cimahi Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cimahi Tahun 2023–2026 untuk mewujudkan visi CIMAHI KOTA "CERDAS" yaitu *Creative, Egalitarian, Religious, Developable, Accretive, Sustainable*.



Pencapaian sasaran pembangunan daerah Kota Cimahi di Tahun 2024 memperlihatkan progres pembangunan di tahun kedua RPD Kota Cimahi dalam mewujudkan kota yang mampu mengatasi rintangan dan ancaman yang timbul serta dapat mengambil kesempatan menjadi kota yang unggul, berbekal pada pengembangan kreativitas dalam produksi, egaliter dalam kehidupan yang demokratis, serta didukung masyarakat yang religius akan berdaya saing untuk dapat membangun kota yang terus maju dan berkembang menuju kemandirian pelayanan kota bagi kehidupan yang lebih baik.

Sejalan tekad kami untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, maka pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Cimahi tidak terlepas dari kerjasama semua pihak, yaitu Pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat Kota Cimahi.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Cimahi Tahun 2024 ini bermanfaat dan menjadi bahan refleksi atas pencapaian kinerja Pemerintah Daerah sekaligus evaluasi dalam rangka penyempurnaan dalam meningkatkan kinerja pada penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb

Cimahi, Maret 2025

WALI KOTA CIMAHI,



LETKOL (PURN) NGATIYANA, S.A.P.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam mewujudkan *Good Governance*, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2024 merupakan pertanggungjawaban kinerja yang harus disampaikan kepada masyarakat secara transparan. Pertanggungjawaban tersebut disampaikan kepada pemerintah pusat secara administratif dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Berdasarkan Permenpan-RB Nomor 53 Tahun 2014, pengertian laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2024 adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan atau sebagai sarana strategis untuk mengevaluasi bagi Pemerintah Kota Cimahi untuk meningkatkan kinerja ke depan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Cimahi Tahun 2024 memuat laporan realisasi hasil penyelenggaraan pemerintahan dalam periode satu tahun anggaran. LKIP 2024 merupakan pelaporan kedua dalam periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cimahi tahun 2023-2026 dengan visi **“CIMAHI KOTA CERDAS”**.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026 dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2023 ditetapkan 7 Sasaran Strategis, 12 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengacu pada 5 misi dalam RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026 yang dijelaskan sebagai berikut:

- Misi pertama “Mewujudkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Berakhlak Mulia, Berbudaya, Menerapkan Ilmu dan Teknologi, Memiliki Jejaring Sosial, Produktif dan Unggul” yang terdiri dari 2 Sasaran Strategis dan 4 Indikator Kinerja Utama (IKU);
- Misi kedua “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik” terdiri dari 1 Sasaran Strategis dan 2 Indikator Kinerja Utama (IKU);
- Misi ketiga “Meningkatkan Perekonomian yang Berdaya Saing serta Berbasis Inovasi Daerah” terdiri dari 1 Sasaran Strategis dan 3 Indikator Kinerja Utama (IKU);

- Misi keempat “Mewujudkan Keserasian Pembangunan yang Berkeadilan” yang terdiri dari 1 Sasaran Strategis dan 1 Indikator Kinerja Utama (IKU);
- Misi kelima “Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan yang Sesuai Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan” terdiri dari 2 Sasaran Strategis dan 2 Indikator Kinerja Utama (IKU);

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Pada tahun anggaran 2024, pencapaian kinerja 7 Sasaran Strategis dan 12 Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Cimahi yang dilaksanakan oleh perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi, serta penyerapan anggaran pada Perjanjian Kinerja Kota Cimahi tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Hasil rekapitulasi IKU menunjukkan bahwa terdapat 10 (sepuluh) Indikator yang tercapai dan 2 (dua) indikator yang tidak tercapai
- Dari 12 (dua belas) IKU, terdapat 8 (delapan) indikator yang melampaui target dengan capaian kinerja sebesar 100,54%, yaitu indikator Indeks Kesehatan, 100,60% capaian indikator Indeks Pengetahuan, 106,18% yaitu capaian Indikator Indeks Reformasi Birokrasi, capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi yaitu 101,35%, capaian kinerja tingkat kemiskinan 105,79%, capaian kinerja TPT yaitu 113,25%, capaian indeks resiko bencana yaitu 109,45%, capaian indeks pemberdayaan gender yaitu 101,69%.
- Terdapat 2 (dua) IKU dari 12 (dua belas) IKU yang capaian kinerjanya tidak tercapai 100% yaitu: Indeks Gini dengan capaian 96,92% dan Tingkat Partisipasi Masyarakat yaitu 81,66%.
- Anggaran belanja langsung yang dianggarkan pada APBD Kota Cimahi tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 1.651.652.247.993,- dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 1.575.042.023.748,- atau sebesar 95,36%.

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Pemerintah baik Pusat maupun Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), wajib menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan suatu sistem yang dapat menunjang pelaksanaannya, sistem tersebut dikenal dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pelaksanaan SAKIP, didasarkan pada Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Selain itu, mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 pasal 5 penyelenggaraan SAKIP meliputi: perencanaan strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, reviu dan evaluasi kinerja. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya.

Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Pemerintah Daerah Kota Cimahi berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selain itu, penyusunan dokumen LKIP Kota Cimahi Tahun 2024 mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cimahi Tahun 2023-2026, yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2023, Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cimahi Tentang Rencana Kinerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2024, Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBDP Tahun 2024.

Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP oleh Kemenpan dan RB menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Cimahi pada tahun 2019 mendapatkan nilai **66,00** atau predikat “**B**”, pada Tahun 2020 mengalami penurunan nilai menjadi **65,07** atau predikat “**B**”, pada Tahun 2021 memperoleh nilai

65,88 atau predikat B dan mengalami kenaikan sebanyak 0,81 poin dan pada Tahun 2022 memperoleh nilai **65,14**, tahun 2023 kota Cimahi memperoleh nilai **65,90** dengan predikat B dan mengalami kenaikan poin sebesar **0,76** poin, dan pada tahun 2024 kota Cimahi memperoleh nilai **66,22** dengan predikat “B” dan mengalami kenaikan poin 0,32.

Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “baik”, yaitu kualitas penerapan manajemen kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil telah menunjukkan hasil yang baik pada sebagian unit kerja. Dari catatan hasil evaluasi SAKIP oleh Kemenpan dan RB Tahun 2024 telah kami tindaklanjuti dalam penyusunan dokumen LKIP Tahun 2024 ini.

2. DASAR HUKUM

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 2) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah.
- 5) Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026

3. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LKIP KOTA CIMAHU

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Cimahi tahun 2024 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi Pemerintah Daerah Kota Cimahi dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama Kota Cimahi yang telah ditetapkan pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Cimahi adalah sebagai sarana bagi Pemerintah Kota Cimahi dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumberdaya

yang telah dipercayakan kepada Pemerintah Kota Cimahi serta sebagai alat atau sarana atau bahan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja ke depan.

4. ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Dalam penyusunan RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026, salah satu pertimbangan identifikasi isu strategis tahun 2023-2026 yaitu permasalahan yang terdapat dalam hasil monitoring dan evaluasi kinerja tahunan dalam RPJMD Kota Cimahi 2017-2022.

Hal lain yang menjadi pertimbangan dalam penentuan isu strategis Kota Cimahi tahun 2023-2026 adalah perkembangan capaian pembangunan dan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, tujuan pembangunan nasional terutama SPM, isu global dan dinamika internasional terutama yang menyangkut pencapaian SDG's. Berdasarkan tinjauan terhadap hal-hal tersebut, maka ditetapkan 5 (lima) isu strategis Kota Cimahi meliputi:

1. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dihadapi oleh hampir semua daerah di Indonesia. Kondisi ini umumnya ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan, gizi serta kesejahteraan penduduk, yang disebabkan oleh terbatasnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki dan yang dimanfaatkan terutama dari tingkat pendidikan baik formal maupun non formal.

Tingkat kemiskinan di Kota Cimahi selama periode 2018-2023 cenderung mengalami fluktuatif, namun angka tersebut selalu berada di bawah tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Barat maupun nasional. Pada Tahun 2018, tingkat kemiskinan di Kota Cimahi telah mencapai 4,94%, sedangkan Provinsi Jawa Barat mencapai 7,45% dan nasional sebesar 9,66%. Pada Tahun 2020 dan 2021, tingkat kemiskinan di Kota Cimahi terjadi peningkatan akibat adanya pandemi *Covid-19* yang menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan yang signifikan. Namun, seiring dengan berakhirnya masa pandemi tersebut, laju pertumbuhan ekonomi mulai meningkat, program jejaring pengaman sosial untuk mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga masyarakat juga berhasil dilaksanakan, maka tingkat kemiskinan di Kota Cimahi mulai mengalami penurunan sampai mencapai 4,66% di Tahun 2023. Untuk Provinsi Jawa Barat dan

Nasional, pada Tahun 2023, tingkat kemiskinan berada pada angka 7,62% dan 9,4. Keduanya masing berada di atas capaian Kota Cimahi. Pada tahun 2024 realisasi tingkat kemiskinan Kota Cimahi senilai 4,39, turun 0,27 poin dari realisasi tahun 2023 senilai 4,66.

Kualitas Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi di Kota Cimahi berdasarkan pada beberapa hal yaitu: Peningkatan LPE (laju pertumbuhan ekonomi), peningkatan upaya pemerataan pendapatan (indeks gini) dan peningkatan upaya penyerapan tenaga kerja yang dalam pelaksanaannya masih memerlukan beberapa perbaikan yaitu:

- Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sering dianggap sebagai indikator kesehatan ekonomi suatu wilayah dimana Semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi, semakin cepat perekonomian tumbuh dan semakin banyak kesempatan untuk menciptakan lapangan kerja baru, memperbaiki standar hidup, dan mengurangi kemiskinan. Pada tahun 2022, LPE Kota Cimahi kembali menunjukkan angka yang positif mencapai angka 5,92%, melebihi target yang ditetapkan yaitu 5,11%, capaian LPE tersebut mengalami perubahan sebesar 41,29% bila dibandingkan dengan capaian LPE Kota Cimahi Tahun 2021 dengan capaian angka 5,35%. Hal ini menunjukkan aktivitas produktivitas perekonomian daerah yang mulai membaik serta daya beli masyarakat yang meningkat seiring dengan mulai berdampak program-program pemerintah dalam usaha pemulihan ekonomi dan harus dilaksanakan secara berkelanjutan agar LPE terus meningkat. Tahun 2023 menjadi tahun yang penuh tantangan bagi perekonomian Indonesia terutama disebabkan tekanan inflasi masih berlanjut. Secara nasional Pertumbuhan ekonomi melambat menjadi 5,05%. Melambatnya laju pertumbuhan nasional tentu saja diikuti pula dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi regional Jawa Barat yang pada tahun 2023 mencapai 5% dimana LPE Kota Cimahi pada tahun 2023 mencapai 5,19%. Meskipun melambat LPE Kota Cimahi masih berada diatas LPE Provinsi Jawa Barat. Nilai Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Cimahi tahun 2024 menunjukan perkembangan yang lebih baik dari pada tahun 2023. Pada tahun 2024 realisasi LPE Kota Cimahi senilai 5,26 dari target 5,19.

2. Tata Kelola Pemerintahan

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan

dan sumber daya manusia aparatur. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Nilai IRB Kota Cimahi pada tahun 2022 masuk pada kategori B (BAIK) dengan nilai 62,96 dan mengalami peningkatan dari pencapaian tahun 2021 dimana Kota Cimahi mendapat kategori B (BAIK) dengan nilai 60,01. Sedangkan pada tahun 2023 IRB Kota Cimahi mengalami penilaian yang naik signifikan yaitu 81,26 dengan capaian predikat A- dan pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 5,02 poin dengan capaian 86,28 dan mendapat predikat A.

Jika dilihat dari sisi akuntabilitas, Pemerintah Kota Cimahi masih memerlukan berbagai perbaikan, terutama dalam capaian penilaian kinerja pemerintahan. Diharapkan isu ini dapat diperbaiki melalui berbagai upaya untuk menciptakan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*, regulasi yang lebih tertib serta tidak tumpang tindih dan kondusif, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik.

Hasil Evaluasi SAKIP Kota Cimahi pada tahun 2022 mengalami penurunan nilai jika dibandingkan dengan tahun 2021. Pada Tahun 2022 memperoleh nilai **65,14** sedangkan tahun 2021 memperoleh nilai **65,88** meskipun masih berada pada predikat yang sama yaitu B namun terdapat penurunan sebanyak 0,74 poin, tahun 2023 kota Cimahi memperoleh nilai 65,90 dengan predikat B dan mengalami kenaikan poin sebesar 0,76 poin, dan pada tahun 2024 kota Cimahi memperoleh nilai 66,22 dengan predikat “B” dan mengalami kenaikan poin 0,32.

3. Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan

Pengertian dan ruang lingkup daya dukung dan daya tampung lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya, sedangkan daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Hal ini dijabarkan dalam Misi “Berkelanjutan yang Sesuai Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan” dengan Indikator Kinerja Utama yaitu “Indeks *Liveable City* Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Infrastruktur”. Permasalahan lingkungan yang menjadi isu strategis di kota Cimahi yaitu rendahnya ketaatan pemanfaatan ruang, terbatasnya

ketersediaan ruang terbuka publik, kurangnya pengendalian pengambilan air tanah dan air sungai, rendahnya akses air limbah aman, tidak adanya lahan IPAL perkotaan, masih adanya sampah yang belum terkelola, kurangnya jumlah hunian layak dan terjangkau, kurangnya infrastruktur publik yang ramah kelompok rentan, dengan sasaran misi sebagai berikut:

1. Berkurangnya luasan banjir
2. Meningkatnya Kualitas Lingkungan
3. Meningkatnya Kualitas Permukiman
4. Meningkatnya pelayanan transportasi yang terpadu dan berkualitas
5. Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati
6. Terwujudnya keserasian pemanfaatan ruang dengan perencanaan tata ruang di Kota Cimahi
7. Terwujudnya kualitas bangunan gedung dalam kondisi baik
8. Meningkatnya ketahanan bencana

Pada tahun 2024 realisasi Indeks *Livable City* Kota Cimahi tercapai 69,70, turun 1,62 poin dari realisasi tahun 2023 senilai 68,08 penurunan poin terjadi karena adanya beberapa penyesuaian beberapa poin pertanyaan dalam metode survey. Capaian IKU Indeks *Liveable City* Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Infrastruktur pada tahun 2023 yaitu 100% dengan target Sedang, dan pada tahun 2024 Capaiannya yaitu 100% dengan target sedang. *Liveble City Indeks* (LCI) dijadikan sebagai salah satu IKU Kota Cimahi mulai tahun 2023 yang dicantumkan dalam dokumen RPD.

4. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Peningkatan kualitas SDM terletak pada kualitas hulunya yaitu pendidikan, kurangnya daya saing sumber daya manusia karenakurang jelasnya pengelolaan pendidikan. Maka, perbaiki sistem pendidikan, utamanya revitalisasi sistem pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi seyogyanya terus menjadi pengarusutamaan, penataan kompetensi melalui pelatihan dan sertifikasi tenaga pengajar, perancangan program dan desain kurikulum, standar pelatihan hingga penyelenggaraan pelatihan kerja, sehingga kebijakan *link and match* dapat benar-benar berjalan. Kondisi kesehatan SDM juga menjadi salah satu isu penting dalam menciptakan SDM

yang berkualitas dan berdaya saing mengingat SDM yang memiliki kondisi kesehatan yang baik tentunya akan memiliki kualitas hidup yang lebih baik pula sehingga mampu memaksimalkan seluruh potensi dirinya dalam berkreasi dan turut serta dalam melaksanakan pembangunan demi kemajuan bersama di Kota Cimahi. Untuk itu maka isu terkait kualitas kesehatan ini perlu terus ditindaklanjuti melalui berbagai upaya yang bertujuan meningkatkan kualitas kesehatan individu dan masyarakat Kota Cimahi baik yang sifatnya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif.

1. RENSTRA KOTA CIMAHI

VISI DAN MISI KOTA CIMAHI

VISI KOTA CIMAHI

“CIMAHI KOTA CERDAS”

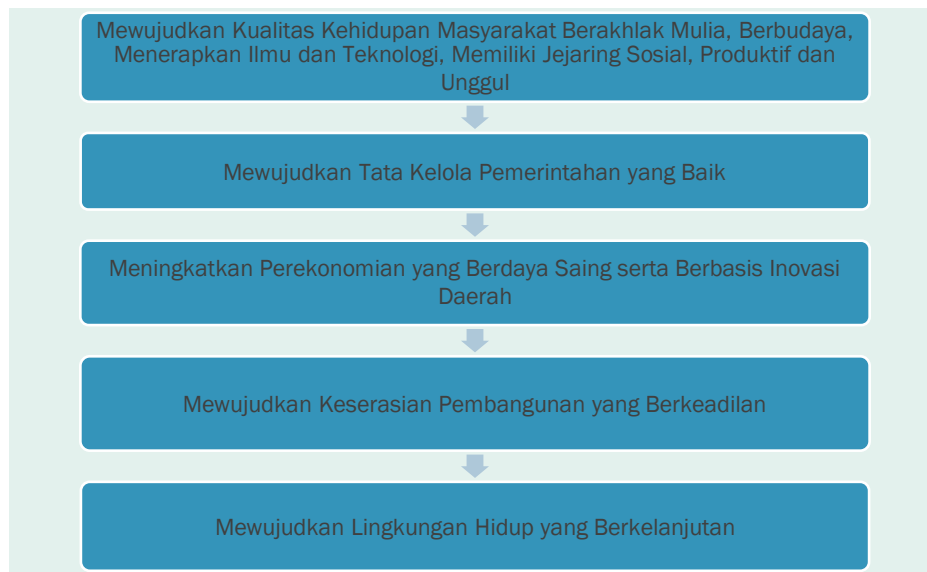
Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah yang Berakhir Pada Tahun 2022, maka penentuan Tujuan dan Sasaran pada penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cimahi Tahun 2023-2026 didasarkan pada Visi Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cimahi Tahun 2005-2025.

Adapun visi pembangunan jangka panjang Kota Cimahi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

“CIMAHI KOTA “CERDAS”

<i>Creative</i>	{	• dapat berkreasi dalam bentuk aslinya serta produktif
<i>Egalitarian</i>	{	• memandang kesamaan derajat manusia atau menjadi sifat dari demokratis yang saat ini sedang berkembang di negara kita
<i>Religious</i>	{	• sifat kota yang agamis mengamalkan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa secara konsekuen
<i>Developable</i>	{	• kota yang berkemampuan kompetitif untuk dibangun
<i>Accretive</i>	{	• kota memiliki nilai tambah untuk terus maju dan berkembang
<i>Sustainable</i>	{	• tercapainya kota yang dapat mencukupi kebutuhan warganya secara berkelanjutan menjangkau lintas generasi

Dengan demikian, visi **CIMAHI KOTA “CERDAS”** adalah mewujudkan kota yang mampu mengatasi rintangan dan ancaman yang timbul serta dapat mengambil kesempatan menjadi kota yang unggul, berbekal pada pengembangan kreativitas dalam produksi, egaliter dalam kehidupan yang demokratis, serta didukung masyarakat yang religius akan berdayasaing untuk dapat membangun kota yang terus maju dan berkembang menuju kemandirian pelayanan kota bagi kehidupan yang lebih baik. Untuk mencapai visi RPJPD tersebut ditetapkan 5 (lima) misi jangka Panjang Kota Cimahi, yaitu:



- **Misi Satu : Mewujudkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Berakhlak Mulia, Berbudaya, Menerapkan Ilmu dan Teknologi, Memiliki Jejaring Sosial, Produktif dan Unggul.**

Memperkuat jati diri dan karakter masyarakat kota melalui pendidikan membentuk manusia bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, disiplin dan taat aturan serta bermoral, memelihara kerukunan antar warga kota, dan antar budaya, mengembangkan modal sosial dan mengembangkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing yang menguasai dan memanfaatkan iptek, membangun keterkaitan produksi, distribusi, dan pelayanan dalam rangka meraih keunggulan kompetitif sehingga memiliki kebanggaan sebagai warga kota untuk meraih kehidupan yang lebih baik.

- **Misi Dua : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**

Cakupan perbaikan tata kelola pemerintahan tidak hanya terbatas pada sektor pemerintahan, tetapi juga meliputi sektor swasta untuk memperbaiki tata kelolanya. Selain itu hal mendasar yang menjadi kewajiban adalah pengarusutamaan paradigma sebagai pelayan publik, peningkatan efektivitas dan akuntabilitas kegiatan pemerintahan daerah sehingga tercapai pelaksanaan fungsi-fungsi pelayanan birokrasi dan penanggulangan korupsi.

- **Misi Tiga : Meningkatkan Perekonomian yang Berdaya Saing serta Berbasis Inovasi Daerah**

Daya saing ekonomi kota dibangun oleh penguasaan akan keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan yang unggul dan inovatif memperhatikan keterkaitan antar pelaku dan sumberdaya lokal/daerah sehingga masyarakat lebih banyak berperan di dalamnya dan ikut menikmati hasil pertumbuhan ekonomi sekaligus nilai tambah yang terjadi. Untuk menjangkau keunggulan komparatif, kompetitif dan kooperatif harus didukung para pekerja yang dilengkapi dengan keahlian, kompetensi, dan kemampuan untuk bekerja. Demikian juga usaha mikro, kecil, dan menengah diharapkan dapat tumbuh dan berkembang menjadi andalan ekonomi lokal yang kompetitif yang dapat meningkatkan produktifitas dan daya saing yang lebih baik.

- **Misi Empat : Mewujudkan Kesenjangan Pembangunan yang Berkeadilan**

Pengurangan kemiskinan tidak sepenuhnya mengandalkan pertumbuhan ekonomi saja, tetapi memerlukan intervensi pemerintah kota yang tepat dan afirmatif terhadap kelompok yang terpinggirkan untuk memastikan semua kelompok memiliki akses yang sama terhadap kesempatan ekonomi yang muncul. Selain itu mengurangi kesenjangan antar ekonomi lokal dan ekonomi formal serta kesenjangan pelayanan sarana dan prasarana dasar, kualitas manusia dari diskriminasi menurut status, golongan, tingkat pendapatan dan gender.

- **Lima : Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan**

Yaitu menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan, menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan, mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan ruang terbuka hijau, konservasi, permukiman dan kegiatan sosial ekonomi.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026 merupakan pembangunan tahap ke-5 (lima) dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cimahi Tahun 2005-2025, yang mana dalam kurun waktu tersebut akan dilakukan **Pemeliharaan kondisi dinamis masyarakat Madani Cimahi dengan mempertahankan semua keunggulan yang telah dicapai serta terus meningkatkan dan memanfaatkan semua potensi yang dimiliki**. Tujuan Kota yang terdapat pada dokumen RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026 ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama Kota yang terdiri dari:

1. Meningkatkan Kualitas Dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
2. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
4. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi
5. Menurunnya Angka Kemiskinan

6. Terpenuhiya Standar Pelayanan Perkotaan
7. Meningkatkan Ketahanan Bencana.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Perubahan Kota Cimahi Tahun 2024 disusun berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang ada dalam Rencana Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan tahun 2024. Perjanjian Kinerja terdiri dari 7 Sasaran dan 12 Indikator. Penyajian target-target pada Perjanjian Kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1.
Perjanjian Kinerja Kota Cimahi Tahun 2024 (Murni)

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET
	1	2	3
	MISI 1 : Mewujudkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Berakhlak Mulia, Berbudaya, Menerapkan Ilmu dan Teknologi, Memiliki Jejaring Sosial, Produktif dan Unggul		
		Indeks Kesehatan	83,43
1	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	77,30
		Indeks Pengetahuan	75,29
2	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	55%
	MISI 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik		
3	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	60,75 (B)
		Opini BPK	WTP
	MISI 3 : Meningkatkan Perekonomian yang Berdaya Saing serta Berbasis Inovasi Daerah		
		Indeks Gini	0,406
4	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	5,15 - 5,95%
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	12,38%
	MISI 4 : Mewujudkan Keserasian Pembangunan yang Berkeadilan		
5	Menurunnya Angka Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	5,30%
	MISI 5 : Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan yang Sesuai Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan		
6	Terpenuhinya Standar Pelayanan Perkotaan	Indeks <i>Liveable City</i> Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Infrastruktur	Sedang
7	Meningkatkan Ketahanan Bencana	Indeks Resiko Bencana	105 (kelas resiko sedang)

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Kota Cimahi Perubahan Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET
	1	2	3
	MISI 1 : Mewujudkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Berakhlak Mulia, Berbudaya, Menerapkan Ilmu dan Teknologi, Memiliki Jejaring Sosial, Produktif dan Unggul		
		Indeks Kesehatan	84,31
1	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	74,36
		Indeks Pengetahuan	76,41
2	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	70,17%
	MISI 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik		
3	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	81,26 (A-)
		Opini BPK	WTP
	MISI 3 : Meningkatkan Perekonomian yang Berdaya Saing serta Berbasis Inovasi Daerah		
		Indeks Gini	0,39
4	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	5,19-5,48%
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	10,34%
	MISI 4 : Mewujudkan Keserasian Pembangunan yang Berkeadilan		
5	Menurunnya Angka Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	4,66%
	MISI 5 : Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan yang Sesuai Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan		
6	Terpenuhinya Standar Pelayanan Perkotaan	Indeks <i>Liveable City</i> Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Infrastruktur	Sedang
7	Meningkatkan Ketahanan Bencana	Indeks Resiko Bencana	72,63 (kelas resiko sedang)

Pada Perjanjian Kinerja Kota Cimahi Perubahan Tahun 2024 terjadi perubahan target jika di perbandingkan dengan target pada Perjanjian Kinerja (Murni) Kota Cimahi Tahun 2024. Target kinerja yang di gunakan pada Dokumen LKIP Kota Cimahi tahun 2024 adalah target pada Perjanjian Kinerja Perubahan sesuai dengan dokumen RKPD Perubahan Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2024. Perubahan tersebut dilakukan mengikuti hasil evaluasi pencapaian target-target indikator kinerja utama (IKU) pada tahun 2023.

INDIKATOR KINERJA UTAMA KOTA CIMAHI
BERDASARKAN RKPd KOTA CIMAHI
TAHUN 2023-2025



Strategis Sasaran	Indikator kinerja	Satuan	Target tahunan			Formulasi	Alasan dijadikan Indikator	Penanggung jawab IKU	Sumber Data
			2023	2024	2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Indeks Kesehatan	Indeks	83,42	83,41	84,31	$I_{\text{Kesehatan}} = \frac{AHH - AHH_{\min}}{AHH_{\max} - AHH_{\min}}$ AHH = Angka Harapan Hidup	Berdasarkan Dokumen RPD 2023-2028	Dinas Kesehatan	BPS
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	77,25	74,38	77,35	$\text{Indeks Pemberdayaan Gender} = \frac{(\text{Keterlibatan Perempuan di Parlemen} + \text{Perempuan sebagai Tenaga Profesional} + \text{Sumbangan Pendapatan Perempuan})}{3}$ *) dalam indeks	Berdasarkan Dokumen RPD 2023-2028	DP3AP2KB	BPS
	Indeks Pengetahuan	Indeks	75,29	78,41	78,50	$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{\min}}{HLS_{\max} - HLS_{\min}}$ $I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{\min}}{RLS_{\max} - RLS_{\min}}$ $I_{\text{pendidikan}} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$ HLS = Harapan Lama Sekolah RLS = Rata2 Lama Sekolah	Berdasarkan Dokumen RPD 2023-2028	Dinas Pendidikan	BPS
Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	%	50%	70,17 %	70,17 %	$TP \text{ Masyarakat} = \frac{(P \text{ Masyarakat dalam Perencanaan} + P \text{ Pemuda} + \text{Pelaku Kebudayaan} + \text{Masyarakat Aktif Berolah Raga})}{4}$ *) dalam %	Berdasarkan Dokumen RPD 2023-2028	Bappelitbangda	Bappelitbangda
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	80,73	81,28 (A-)	81,28 (A-)	Dihitung oleh Kementerian PAN-RB	Berdasarkan Dokumen RPD 2023-2028	Bagian Organisasi	Kementerian PAN-RB

Strategis Sasaran	Indikator kinerja	Satuan	Target Tahunan			Formulasi	Alasan dijadikan indikator	Penanggung jawab IKU	Sumber Data
			2023	2024	2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Opini BPK	Nilai	WTP	WTP	WTP	Dihitung oleh BPK RI	Berdasarkan Dokumen RPD 2023-2026	BPKAD	BPK RI
Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi	Indeks Gini	Indeks	0,408	0,39	0,379 0,386	$G = 1 - \sum_{i=1}^n P_i(Q_i + Q_{i+1})$ Dimana: Pi : persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas ke-i Qi : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i Nilai gini rata-rata berkisar antara 0 dan 1, jika: 0 < 0,3 = ketimpangan rendah 0,3 < 0 < 0,5 = ketimpangan sedang 0 > 0,5 = ketimpangan tinggi	Berdasarkan Dokumen RPD 2023-2026	Bappeitbangda	BPS
	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	5,45	5,19-5,48	5,19-5,60	$\frac{PDRB_{(t+1)} - PDRB_{(t)}}{PDRB_{(t)}} \times 100\%$ Dimana: t+1 = tahun pengamatan PDRB t = tahun pengamatan PDRB sebelumnya	Berdasarkan Dokumen RPD 2023-2026	Bappeitbangda	BPS
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	12,61	10,34	9,05-9,86	$\frac{\text{Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk angkatan kerja}} \times 100\%$	Berdasarkan Dokumen RPD 2023-2026	Dinas Tenaga Kerja	BPS
Menurunnya Angka Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	%	5,35	4,66	3,67-4,28	$P_n = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^n \left[\frac{Z - Y_i}{Z} \right]^p$ Dimana: n = 5 z = garis kemiskinan yi = Rata-rata penghasilan per kapita sebuah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (i=1,2,3, ...,4), yi < z q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan N = jumlah penduduk	Berdasarkan Dokumen RPD 2023-2026	Bappeitbangda	BPS
Terpenuhinya Standar Pelayanan Perkotaan	Indeks Liveable City Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Infrastruktur	Indeks	Sedang	Sedang	Sedang	Indeks Liveable City Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Infrastruktur dihasilkan dari survey primer yang dilakukan oleh Bappeitbangda dengan instrumen	Berdasarkan Dokumen RPD 2023-2026	Bappeitbangda	Bappeitbangda

Strategis Sasaran	Indikator kinerja	Satuan	Target Tahunan			Formulasi	Alasan dijadikan indikator	Penanggung jawab IKU	Sumber Data
			2023	2024	2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatkan Ketahanan Bencana	Indeks Resiko Bencana	Indeks	105 (kelas resiko sedang)	72,63 (kelas resiko sedang)	72,63 (kelas resiko sedang)	$R = (H \times V \times (1 - C))^{1/3}$ Dimana: R: Indeks Risiko Bencana H: Indeks Bahaya C: Indeks Kapasitas	Berdasarkan Dokumen RPD 2023-2026	BPBD	BPBD - BNPB

Cimahi, April 2025
 WALI KOTA CIMAHI

 LETKOL (PURN) NGATIYANA, S.A.P.